

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Provinsi Riau

1. Periode 5 Maret 1958 - 6 Januari 1960

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 (enam) tahun (17 November 1952 s/d 05 Maret 1958). Dalam Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No.75 Tahun 1957, Daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah Daerah Swatantra Tingkat II:²⁴

- a. Bengkalis
- b. Kampar
- c. Indragiri
- d. Kepulauan Riau termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956
- e. Kotoparaja Pekanbaru termaktub dalam undang-undang No. 8 tahun 1956.

Dengan ini Keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr.S.M.Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada Tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri

²⁴ <http://sejarah.provinsi-riau.com>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau Sering dengan terjadinya pemberontakan PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas.

Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali, Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI Pemerintah di Kabupaten mulai diterbitkan.sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay. di Bengkalis Abdullah Syafei. di Pekanbaru dibentuk Filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjung Pinang, yaitu Bupati Dt. Abdurrahman dibantu oleh Wedana T. Kamuruzzaman.

2. Pemindahan Ibu Kota

Karena situasi daerah telah mulai aman maka Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah memulai difikirkan untuk menetapkan Ibu Kota Provinsi Riau hanya bersifat Sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim Kawat kepada Gubernur Riau Tanggal 30 Agustus 1958 No.Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/03-D/58 dibentuk panitia penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I.

3. Daerah Swatantra Tingkat I Riau

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat. Penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai Ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No.Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau. Untuk merealisasi ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia Interdepartementel kepentingan pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. sebagai pelaksana di daerah di bentuk pula satu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh penguasa perang Riau Daratan Letkol. Kaharudin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi Gubernur Mr.S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di Gedung Sekolah Pei Ing pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

4. Periode 6 Januari 1960 – 15 November 1966

Dengan dilantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan, Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan Ibukota dimulai Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota..

5. Pekanbaru Menjadi Ibukota

Aparatur Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Penpres No. 6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di Gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari:

- a. Wan Ghalib
- b. Soeman Hs

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Muin Sadjoko

Anggota-Anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan Pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen disusunlah Program Kerja Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

- a. Pemulihan pehubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat
- b. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
- c. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat Jalan Raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharudin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantara pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, Gedung Pertemuan Umum (Gedung Trikora), Gedung Universitas Riau, Wisma Riau, Mesjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putra dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain. Untuk penyempurnaan Pemerintah Daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan Hearing dengan Partai-partai Politik dan Organisasi-organisasi Massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan di samping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur Kepala Daerah yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay. Masuknya unsur-unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan “NASAKOM”.

Kemudian Penpres No. 6 tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah. Nasakomisasi diterapkan tidak melalui ketentuan Perundang-undangan tetapi tekanan-tekanan dari atas. Sejalan dengan itu dibentuk pula yang dinamakan Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari Unsure Nasakom. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Dengan sendirinya di dalam Front Nasional ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertarung ideologi bertentangan, yang menurut cita-cita haruslah dipersatukan. Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal atas dasar Nasakomisasi ini maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol. Disamping penyempurnaan aparatur Pemerintahan, oleh Pemerinah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah Kabupaten yang ada stagnasi dalam kelancaran jalannya roda Pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-siapi dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten, untuk itu maka oleh Pemerintah Derah Provinsi Riau Pada tanggal 15 Desember 1962 dengan Sk.No615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Dengan di angkatnya Kolonel Arifn Achmad sebagai cara taker Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 16 Oktober 1966 dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/443-1506. Pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jendral Basuki Rachmad dalam suatu Sidang Pleno DPR-GR Provinsi Riau pada Tanggal 15 November 1966. Kemudian pada tanggal 16 Februari 1967 DPRD-GR Provinsi Riau mengukuhkan Kolonel Arifn Achmad Gubernur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Daerah Provinsi Riau untuk masa jabatan 5 tahun, dengan surat keputusan NO. UP/6/136-260, Tertanggal 24 Februari 1967. surat keputusan tersebut diperbarui dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:146/M/1969 tertanggal 17 Nopember 1969. Hinga Sekarang ini pejabat Gubernur Riau Sudah mengalami beberapa kali Pergantian, yaitu:

- a. Mr.S.M.Amin Periode 1958-1960
- b. H.Kaharudun Nasution Periode 1960-1966
- c. H.Arifin Achmad Periode 1966-1978
- d. Hr.Subrantas.S Periode 1978-1980
- e. H.Prpto Prayinto (Plt) 1980
- f. H.Imam Munandar Periode 1980-1988
- g. H.Baharudin Yusuf (Plh)1988
- h. Atar Sibero(Plt)1988
- i. H.Soeripto Periode 1988-1998
- j. H.Saleh Djasit Periode 1998-2003
- k. H.M.Rusli Zainal Periode 2003-2008
- l. H.Wan Abubakar Periode 2008
- m. H.M.Rusli Zainal Periode 2008-2013
- n. HR. Mambang Mit (Plt) 2013
- o. Djohermansyah Djohan (Pjbt) 2013-2014
- p. H. Annas Maamun Periode 2014
- q. H. Arsyadjuliandi Rachman (Plt) 2014-2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

r. H. Arsyadjuliandi Rachman Periode 2016-2018

s. H. Wan Thamrin Hasyim (Plt) 2018

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya Pelaksanaan Otonomi Daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 11 kabupaten / Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah :

- (1). Kuantan Singingi
- (2). Indragiri Hulu
- (3). Indragiri Hilir
- (4). Pelalawan
- (5). Siak
- (6). Kampar
- (7). Rokan Hulu
- (8). Bengkalis
- (9). Rokan Hilir
- (10). Pekanbaru dan
- (11). Dumai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Letak Geografis Provinsi Riau

Secara geografis, geoekonomi dan geopolitik Provinsi Riau berada dalam kawasan yang sangat strategis, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Provinsi Riau membentang dari lereng bukit barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1 15' Lintang Selatan sampai 4 45' Lintang Utara atau antara 100 03'-109 19 Bujur Timur Greenwich dan 6 50'-1 45' Bujur Barat Jakarta.²⁵

Provinsi Riau mempunyai luas 107.94 Km² dengan Persentasi luas Daratan sebesar 80,11 persen dan Lautan seluas 19,89 Persen. Hal ini berbalik ketika Kepulauan Riau masih merupakan bagian dari Provinsi Riau, dimana lautan lebih luas dari Daratan. Di daerah daratan terdapat 15 Sungai, diantaranya ada 4 Sungai yang mempunyai arti penting bagi Prasarana Perhubungan, yaitu Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Sungai-sungai tersebut membelah dari Pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina.

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan daerah tetangga dan Provinisi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Selat Singapura dan Selat Berhala

²⁵ <http://geografis.provinsi-riau.com>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebelah Selatan : Jambi
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan
- d. Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dari posisi ini kelihatan bahwa Provinsi Riau berbatasan langsung dengan 4 (empat) Provinsi Lainnya yaitu : Provinsi Sumatra Utara, Sumatra barat, Jambi, dan Kepulauan Riau. Disamping itu juga berhadapan langsung dengan 2 (dua) Negara Tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini secara ekonomi justru akan memberikan keuntungan kepada Provinsi Riau apabila bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Peluang tersebut tidak saja di sektor ekonomi tetapi bisa di sektor lainnya.

Memasuki Era Otonomi Daerah, permasalahan-permasalahan batas-batas daerah menjadi mengemuka. Dikatakan penting karena terkait langsung dengan upaya penambahan dan peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepastian hukum bagi masing-masing Daerah. Dalam konteks penyelesaian batas-batas Daerah dibentuk tim dari masing-masing daerah dan dibawah koordinasi Tim Penyelesaian dan Penerapan Batas Daerah (TPPBD). TPPBD provinsi Riau dibentuk dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 26 November 2001 Nomor: Kpts. 530/XI/2001 dan disempurnakan dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 22 Maret 2003 Nomor: 137/III/2003.

Sampai saat ini penyelesaian batas-batas wilayah, baik antar Provinsi maupun batas batas antar Kabupaten masih banyak yang belum diselesaikan. Misalnya saja batas Laut antara Provinsi Riau dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menyangkut Undang undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan Provinsi mempunyai hak dalam pengelolaan hasil kekayaan laut sepanjang 12 mil Laut. Namun sampai sekarang, batas 12 mil laut masing-masing Provinsi masih belum jelas.

Begitu juga batas antar Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau yang perlu dilakukan pengukuran agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha untuk melakukan upaya dalam melakukan tapal batas masing-masing kabupaten/kota yang ada di Riau. Usaha nyata yang sudah dilakukan adalah penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu, sekarang sudah bisa diselesaikan. Belum lagi batas antar kecamatan maupun batas antara desa yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

C. Visi dan Misi Riau

1. Visi

Filosofi pembangunan Daerah Provinsi Riau mengacu kepada nilai-nilai luhur kebudayaan melayu sebagai kawasan lintas budaya yang telah menjadi jati diri masyarakatnya sebagaimana terungkap dari ucapan Laksamana Hang Tuah “Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Melayu Hilang di Bumi”. Posisi Strategis Provinsi Riau ditinjau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik menjadikan kawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau sebagai kawasan yang dapat berperan penting dimasa yang akan datang, terutama terletak di jalur Perdagangan dan Ekonomi Internasional.²⁶

Untuk dapat mewujudkan masyarakat Riau yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi baik secara lokal, Nasional dan Regional serta dilandasi dengan nilai-nilai hakiki kebudayaan melayu yang beradab, Bermoral dan tangguh menghadapi era globalisasi dan modernisasi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat Riau maju dan mandiri, Sejahtera lahir dan batin dan beradat istiadat melayu yang agamis, maka disusunlah visi riau sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No. 36 tahun 2001 Tentang Dasar Pembangunan Daerah Provinsi tahun 2001-2005 yakni :”Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Serta Lahir dan Batin, Di Asia Tenggara Tahun 2020”.

Untuk memberikan gambaran untuk penjabaran Visi Riau 2020, telah dirumuskan visi antara dalam visi 5 tahunan agar setiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Untuk itu sesuai dengan Perda Provinsi Riau No 5 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah dan No 1 tahun 2004 tentang Rencana Strategis

²⁶ <http://visimisi.riau.com>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Renstra) Provinsi Riau tahun 2004-2008, guna mewujudkan Visi Pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten, maka dirumuskan Visi antara Provinsi Riau, yakni :” Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Mengentaskan Kemiskinan, Pembangunan Pendidikan Yang Menjamin Kehidupan Masyarakat Yang Agamis Dan Kemudahan Aksesibilitas, Dan Pengembangan Kebudayaan Yang Menempatkan Kebudayaan Melayu Secara Proposional dalam Kerangka Kebudayaan”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi antara Provinsi Riau kurun waktu 2004-2008, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan visi Riau 2020, maka kedepan Misi pembangunan Riau yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut:²⁷

- a. Mewujudkan Kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan Professional, Moral dan keteladanan pemimpin dan aparat.
- b. Mewujudkan Supremasi Hukum dan penegakan hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat.
- d. Mewujudkan perekonomian potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

²⁷ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis.
- f. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral.
- g. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik.
- h. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan
- i. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.
- j. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

D. Luas Kawasan Gambut di Provinsi Riau

Riau adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang berada di pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sekitar 5,8 juta jiwa. Luas wilayah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang lebih 8,7 juta hektar dimana 7,1 juta hektar berupa hutan dan 5,09 juta hektar adalah lahan gambut.²⁸

Lahan gambut adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Tanah jenis ini banyak di jumpai di daerah-daerah jenuh air seperti rawa, cekungan, atau daerah pantai.

Sebagian besar lahan gambut masih berupa hutan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa langka. Hutan gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Karbon tersimpan mulai dari permukaan hingga di dalam tanah, mengingat kedalamannya bisa mencapai lebih dari 10 meter.

Tanah gambut memiliki kemampuan menyimpan air hingga 13 (tiga belas) kali dari bobotnya. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam hidrologi, seperti mengendalikan banjir saat musim penghujan dan mengeluarkan cadangan air saat kemarau panjang. Kerusakan yang terjadi pada lahan gambut bisa menyebabkan bencana bagi daerah sekitar.

E. Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab

²⁸ <http://www.incas-indonesia.org/id/data/riau/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Presiden dan di pimpin oleh seorang kepala.²⁹ BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan. Badan Restorasi Gambut memiliki wilayah kerja yang terdiri di 7 (tujuh) Provinsi yaitu :

1. Provinsi Riau
2. Provinsi Jambi
3. Provinsi Sumatera Selatan
4. Provinsi Kalimantan Barat
5. Provinsi Kalimantan Tengah
6. Provinsi Kalimantan Selatan
7. Provinsi Papua

Gambar 2.1

Peta wilayah kerja BRG



²⁹ <http://googleweblight.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah kerja Badan Restorasi Gambut yang ditetapkan melalui Perpres 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang kemudian menunjuk gubernur Riau sebagai Penanggung jawab dari pelaksanaan pemulihan dan perbaikan fungsi hidrologis gambut di Provinsi Riau. Pada bulan Mei 2016 Gubernur Riau mengeluarkan surat keputusan tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Riau yang selanjutnya di perbaharui struktur dari Tim Restorasi Gambut tersebut pada bulan Desember 2017 dengan struktur sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur Keanggotaan Tim Restorasi Gambut Riau

No	Nama/Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3	4
1	Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2	Wakil Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Pembina/Pengarah
3	Ketua DPRD Riau	Dprd Riau	Pembina/Pengarah
4	Kepala Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Tinggi Riau	Pembina/Pengarah
5	Kapolda Riau	Polda Riau	Pembina/Pengarah
6	Ketua Pengadilan Tinggi	Pengadilan Tinggi Riau	Pembina/Pengarah
7	Komandan Korem 031 Wirabima	Korem 031 Wirabima	Pembina/Pengarah
8	Komandan Lanud Roesmin Nurjadin	Lanud Roesmin Nurjadin	Pembina/Pengarah
9	Komandan Angkatan Laut Dumai	Angkatan Laut Dumai	Kelompok Ahli
10	Rektor Universitas Riau	Universitas Riau	Kelompok Ahli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Rektor Universitas Lancang Kuning	Universitas Lancang Kuning	Kelompok Ahli
12	Rektor Universitas Islam Negeri Suska	UIN Suska Riau	Kelompok Ahli
13	Rektor Universitas Islam Riau	Universitas Islam Riau	Kelompok Ahli
14	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Ketua
15	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Ketua Harian
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsiriau	Sekretaris
17	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	Wakil Sekretaris
18	Asisten Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Anggota Pimpinan
19	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Anggota Pimpinan
20	Bupati Pelalawan	Pelalawan	Anggota Pimpinan
21	Bupati Indragiri Hulu	Pemerintah Daerah Indragiri Hulu	Anggota Pimpinan
22	Bupati Indragiri Hilir	Pemerintah Daerah Indragiri Hilir	Anggota Pimpinan
23	Bupati Kepulauan Meranti	Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti	Anggota Pimpinan
24	Bupati Bengkali	Pemerintah Daerah Bengkalis	Anggota Pimpinan
25	Bupati Siak	Pemerintah Daerah Siak	Anggota Pimpinan
26	Bupati Rohil	Pemerintah Daerah Rohil	Anggota Pimpinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27	Bupati Rohul	Pemerintah Daerah Rohul	Anggota Pimpinan
28	Bupati Kampar	Kampar	Anggota Pimpinan
29	Walikota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	Anggota Pimpinan
30	Walikota Pekanbaru	Pemerintah Kota Pekanbaru	Anggota Pimpinan
31	Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera Provinsi Riau	Anggota Pimpinan
32	Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Riau	Koordinator Bidang Perencanaan Monev
33	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Riau	Koordinator Bidang Operasi Dan Pemeliharaan
34	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Riau	Koordinator Sosialisasi, Partisipasi Dan Kemitraan
35	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau	Koordinator Pemulihan Lapangan (Revegetasi) Dan Budidaya)

Badan Restorasi Gambut memiliki visi untuk terwujudnya kondisi Ekosistem Gambut yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan misi :

1. Merancang dan mengembangkan pemanfaatan gambut yang berkelanjutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memfasilitasi pemulihan gambut yang terdegradasi
3. Menggalan pasrtisipasi masyarakat dalam pelaksanaan restorasi gambut
4. Memfasilitasi aksi riset untuk mendukung pengelolaan ekosistem.

E. Kondisi Lahan Gambut di Riau Rentang Waktu 5-10 Tahun Yang Lalu

Provinsi Riau memiliki Lahan Gambut terluas di Pulau Sumatera, yaitu 5,09 juta *hektare* atau 56,42 persen dari luas total Lahan Gambut di Sumatera. Selain itu, Riau juga mempunyai lapisan Gambut terdalam di dunia, yaitu mencapai 16 (enam belas) meter, terutama di wilayah Kuala Kampar.³⁰

Di samping itu Provinsi Riau juga memiliki kawasan hutan seluas 5,43 juta hektar yang pada usulan rencana program tahun 2017 Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan sebesar Rp8,3 miliar dalam program pelestarian hutan, kondisi hutan dan lahan gambut di Riau terus mengalami kerusakan akibat *Deforestasi* dan *Degradasi*. Baik itu disebabkan oleh terjadinya alih fungsi gambut, *subsistensi*, *abrasi* dan *intrusi* air laut serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kawasan bergambut Provinsi Riau terdapat di 11 Kabupaten dan Kota dengan luas 4.044 juta Hektar. Luasan ini setara dengan 56,1 persen luas gambut di Pulau Sumatera dengan kondisi baik, kritis, sampai sangat

³⁰ <https://news.okezone.com/read/2017/03/11/340/1640218/miris-2-4-juta-hektare-lahan-gambut-di-riau-kritis>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritis. Namun pada tahun 2012 tersisa 2.005 juta Hektar, dimana sepanjang tahun 2012-2013 terdapat 252.172 Hektar penghancuran hutan alam oleh bisnis sektor berbasis lahan. Jika dibanding tahun sebelumnya, kerusakan sebesar 188 juta Hektar. Tahun 2013 hutan dan lahan di Riau tersisa 1,7 juta Hektar atau tinggal 19 persen dari luas dataran Riau. 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi.³¹

Kebakaran sangat parah terjadi pada 2015. Luas areal yang terbakar mencapai 5.595 hektar. Kebakaran sempat menyebabkan Perekonomian Riau lumpuh. Sekolah diliburkan, Bandar Udara ditutup dan ribuan warga terjangkit ISPA (Inpeksi Saluran Pernapasan Akut).³²

Kemudian setelah kejadian itu Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang bertujuan untuk mengembalikan dan melakukan pemulihan terhadap gambut yang rusak di Indonesia. Pada tahun 2017 setelah Badan tersebut dibentuk Gambut di Riau masih belum di perbaiki dan target yang sudah dicanangkan melalui Perpres tersebut belum terlaksana bahkan yang mirisnya lagi adalah kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Meranti pada awal tahun 2018 Padahal Meranti merupakan pilot project dari Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk pemulihan Ekosistem Gambut.

³¹<http://www.riauonline.co.id/riau/kotapekanbaru/read/2017/11/06/20-tahun-terakhir-gambut-riau-rusak-akibat-deforestasi-dan-degradasi>

³²<https://regional.kompas.com/read/2017/09/18/23030061/1.052-hektar-lahan-dan-hutan-di-riau-ludes-terbakar>